SNI 8288:2017

Standar Nasional Indonesia

# Manajemen pelatihan penanggulangan bencana

ICS 13.200

Badan Standardisasi Nasional

# Daftar isi

Daftar isi ........ i
Prakata ........ ii
Pendahuluan ........ iii
1 Ruang lingkup ........ 1
2 Istilah dan definisi ........ 1
3 Persyaratan teknis ........ 4
3.1 Organisasi pelatihan penanggulangan bencana ........ 4
3.2 Siklus manajemen pelatihan penanggulangan bencana ........ 6
Bibliografi ........ 11

Tabel 1 - Tugas dan fungsi organisasi pelatihan penanggulangan bencana ........ 5

Gambar 1 - Bagan organisasi pelatihan penanggulangan bencana ........ 4
Gambar 2- Siklus manajemen pelatihan penanggulangan bencana ........ 6

# Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 8288:2017, *Manajemen pelatihan penanggulangan bencana*, disusun untuk membangun keseragaman pemahaman dalam melakukan pelatihan penanggulangan bencana. SNI Manajemen pelatihan penanggulangan bencana disusun secara umum dan sederhana sehingga mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan oleh pelbagai pemangku kepentingan dan pengguna terutama dari kalangan masyarakat, pihak swasta, LSM dan para pemangku kepentingan terkait. SNI ini juga dapat memudahkan kalangan pemerintah sampai ke tingkat desa yang berperan dalam mengawasi proses jalannya pelatihan penanggulangan bencana.

SNI ini dirumuskan oleh Komite Teknis 13-08, Penanggulangan Bencana melalui beberapa tahapan-tahapan perumusan SNI, dan terakhir dibahas dalam rapat konsensus nasional pada tanggal 2 Desember 2015 di Bali, yang dihadiri oleh anggota Komite Teknis perwakilan dari pemerintah, produsen, konsumen, pakar, dan pihak lain yang terkait.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standarisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

## Pendahuluan

Indonesia secara geologi terletak di kawasan tektonik aktif dunia yaitu pada pertemuan Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik dengan Lempeng Eurasia. Akibat pertemuan lempeng-lempeng tersebut, selain membentuk potensi sumberdaya alam, juga mengakibatkan tingginya ancaman bencana di berbagai tempat di Indonesia seperti gempabumi, tsunami, gunungapi, longsor atau banjir. Berbagai peristiwa bencana yang pernah terjadi di banyak kawasan di Indonesia telah menimbulkan banyak korban jiwa dan trauma serta kerugian material.

Upaya penanggulangan bencana perlu dilakukan secara komprehensif, baik sebelum dan pada saat sedang terjadinya peristiwa bencana maupun setelah kejadian bencana. Salah satu upaya pengurangan risiko bencana adalah melalui pelatihan penanggulangan bencana yang direncanakan dan dilaksanakan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut serta mandiri.

Pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan mengadapi bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengamanatkan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha. Sesuai dengan fungsinya, pelatihan penanggulangan bencana digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan kapasitas kesiapsiagaan yang masih ada di kalangan pemerintah, masyarakat dan komunitas, pihak swasta, LSM dan para pemangku kepentingan untuk selanjutnya menjadi bahan tindakan perbaikan dan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan ke depan.

SNI Manajemen pelatihan penanggulangan bencana bersifat umum dan sederhana yang diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan SNI pelatihan penanggulangan bencana tematik seperti bencana tsunami, gempabumi, letusan gunung berapi, longsor/gerakan tanah dan bencana banjir serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam manajemen pelatihan penanggulangan bencana. Dengan melaksanakan pelatihan penanggulangan bencana secara berkala dan mandiri yang direncanakan dengan baik, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pemahaman dan keterampilan dalam manajemen pelatihan penanggulangan bencana bagi semua pemangku kepentingan.

# Manajemen pelatihan penanggulangan bencana

## 1 Ruang lingkup

SNI Manajemen pelatihan penanggulangan bencana meliputi penjelasan pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan pelatihan dan peserta pelatihan, tata cara menyelenggarakan pelatihan meliputi penyusunan organisasi pelatihan penanggulangan bencana, pemahaman siklus penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan proses perbaikan serta metode pelatihan secara bertahap mulai dari tahap dasar, menengah dan lanjut.

Pelatihan penanggulangan bencana akan lebih optimal bilamana daerah penyelenggara telah memiliki rencana kontingensi. Untuk daerah yang sudah memiliki rencana kontingensi, pelatihan merupakan uji coba terhadap rencana kontingensi tersebut. SNI Manajemen pelatihan penanggulangan bencana disusun tidak dimaksudkan untuk mengatur pelatihan bersertifikat.

## 2 Istilah dan definisi

### 2.1
**bencana**
peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis

### 2.2
**bermain peran**
bentuk pelatihan yang dilaksanakan dalam ruangan dengan menggunakan alat-alat bantu peraga tertentu

### 2.3
**dokumentasi**
pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi tertentu

### 2.4
**evaluasi**
penilaian atas suatu kegiatan tertentu untuk menetapkan apakah berkesesuaian dengan perencanaan kegiatan tersebut

### 2.5
**geladi lapangan**
metode pelatihan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur pelaku penanggulangan bencana dengan mempraktekkan peran dan fungsi yang telah dipelajari sebelumnya

**2.6**
**geladi posko**
metode pelatihan yang bersifat interaktif seperti kejadian sesungguhnya tanpa pengerahan peralatan

**2.7**
**geladi ruang**
metode pelatihan dalam bentuk diskusi pada tingkatan pengambilan keputusan

**2.8**
**Instruktur**
seorang atau sekumpulan orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya

**2.9**
**komunitas**
kumpulan manusia yang memiliki kegiatan atau hobi tertentu yang sama

**2.10**
**Lembaga Swadaya Masyarakat**
**LSM**
organisasi nirlaba non pemerintah yang terdaftar secara sah sesuai dengan hukum/perundangan yang berlaku

**2.11**
**manajemen penanggulangan bencana**
serangkaian cara, prosedur yang meliputi penetapan kebijakan untuk mengurangi risiko akibat timbulnya bencana, kegiatan pengurangan dan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi

**2.12**
**masyarakat**
sejumlah, sekumpulan manusia dalam arti seluas-luasnya yang terikat oleh suatu kebudayaan yang sama

**2.13**
**organisasi**
kesatuan (susunan dsb) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dsb) dalam perkumpulan dsb., untuk tujuan tertentu.

**2.14**
**pelatihan penanggulangan bencana**
kegiatan yang dilakukan dengan metode tertentu untuk meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko akibat timbulnya bencana, kegiatan pengurangan dan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi

**2.15**
**pengamat**
seorang atau sekelompok orang yang bertugas menjadi peninjau, pemerhati, atau pengamat suatu kegiatan tertentu

**2.16**
**penilai**
seseorang atau sekumpulan orang yang menilai, mengevaluasi, menaksir terhadap suatu benda atau kegiatan tertentu

**2.17**
**potensi bencana**
kondisi alamiah yang dapat menimbulkan atau terjadinya bencana tertentu.

**2.18**
**rencana kontingensi**
proses perencanaan kedepan untuk menghadapi bahaya, dalam keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi sumberdaya disetujui bersama untuk mencegah atau menanggulangi bencana secara lebih baik dalam situasi darurat atau krisis

**2.19**
**skenario pelatihan**
garis besar kegiatan pelatihan yang berisikan alur/cerita proses pelatihan dengan metode tertentu

**2.20**
***Standard Operational Procedure***
**SOP**
deskripsi terstruktur tentang siapa berbuat apa, kapan, di mana, dan bagaimana metode sebuah kegiatan dilaksanakan

**2.21**
**sosialisasi**
kegiatan penyampaian informasi, ajakan, himbauan atau larangan kegiatan tertentu kepada masyarakat umum

**2.22**
**swasta**
sekumpulan manusia, organisasi, kegiatan usaha yang tidak dimiliki oleh pemerintah

**2.23**
**uji latihan**
metoda pelatihan melibatkan aset dan personel sesungguhnya dalam suatu rangkaian skenario pelatihan sederhana.

## 3 Persyaratan teknis

Pelatihan penanggulangan bencana dapat diselenggarakan atas dasar inisiatif dari kalangan pemerintah, masyarakat atau komunitas, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau para pemangku kepentingan terkait dalam menghadapi potensi bencana tertentu. Peserta pelatihan berasal dari lingkungan terbatas seperti perhotelan, sekolah atau industri atau mencakup berbagai kalangan mulai dari unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau para pemangku kepentingan terkait. Pelatihan ini dapat dilaksanakan setelah melalui serangkaian persiapan yaitu membentuk organisasi pelatihan penanggulangan bencana menyiapkan rencana pelatihan dan tingkatan pelatihan dan metoda pelatihan yang akan diterapkan dan mengevaluasi hasil pelatihan penanggulangan bencana.

SNI Manajemen pelatihan penanggulangan bencana diselenggarakan di bawah pengawasan atau didampingi oleh pelatih, pengawas atau lembaga yang kompeten yaitu yang memahami proses dan mekanisme pelatihan penanggulangan bencana baik dari unsur pemerintah, masyarakat terlatih dan lembaga usaha maupun organisasi masyarakat.

### 3.1 Organisasi pelatihan penanggulangan bencana

Susunan organisasi pelatihan penanggulangan bencana diperlihatkan pada Gambar 1 sedangkan uraian tugas dan fungsi organisasi pelatihan penanggulangan bencana diperlihatkan pada Tabel 1.
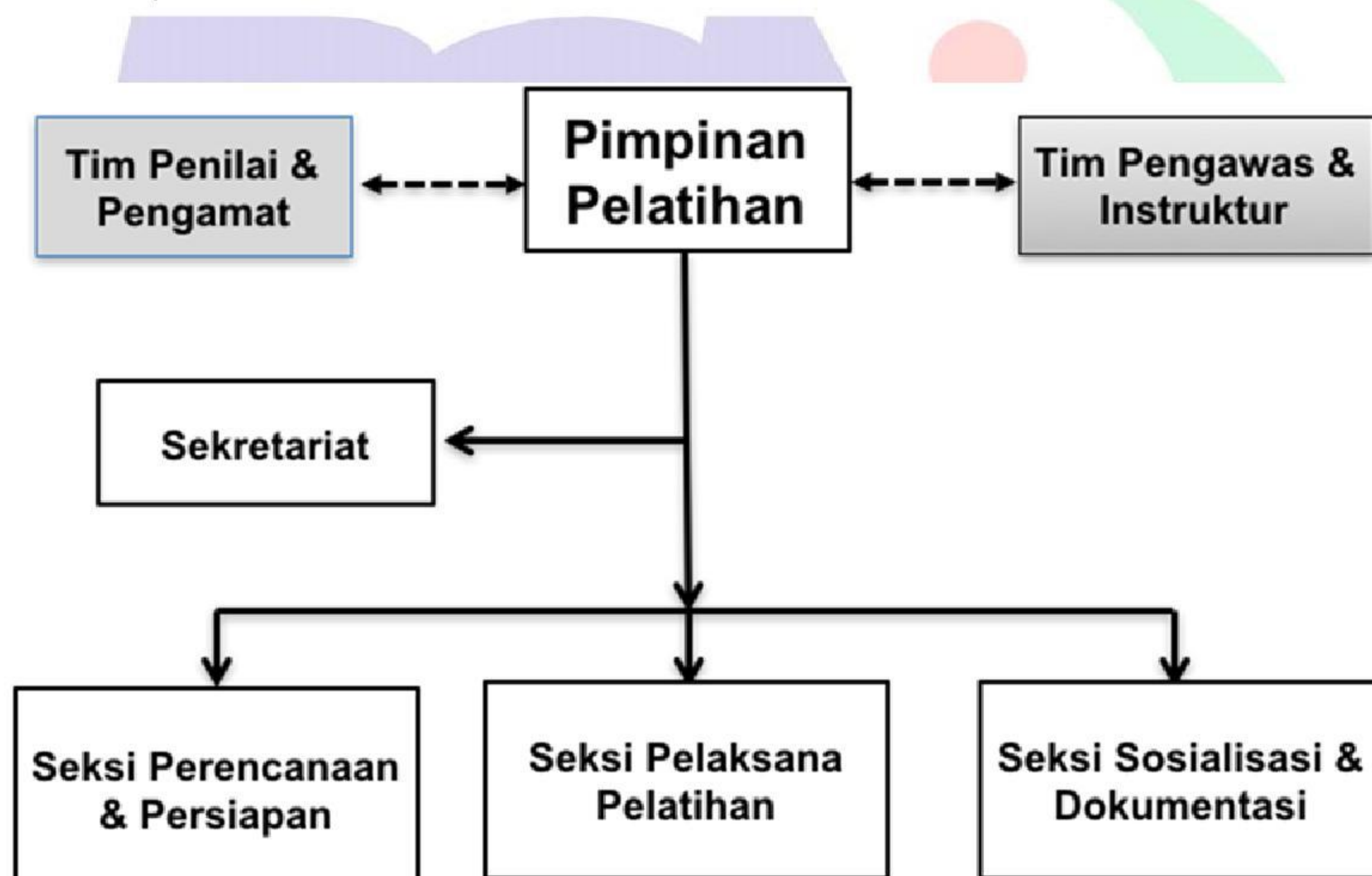
**Keterangan :**

Garis koordinasi
Garis perintah

**Gambar 1 - Bagan organisasi pelatihan penanggulangan bencana**

Prosedur pengajuan koordinasi atau perijinan pelaksanaan pelatihan disampaikan kepada pemerintah atau lembaga berwenang tergantung kepada lingkup kegiatan pelatihan untuk dilakukan penilaian. Bilamana pelatihan ditujukan hanya untuk kalangan tertentu dan terbatas seperti di lingkungan sekolah, hotel atau kawasan industri tanpa melibatkan pengumpulan masa atau menggunakan fasilitas umum, seperti jalan raya atau lapangan, pemohon cukup memberitahukan kepada pemerintah setempat atau lembaga pemerintah yang berwenang terkait dengan rencana pelatihan dan menjelaskan jenis sumber bencana atau potensi bencana, skenario pelatihan, jumlah peserta pelatihan dan pengawas pelatihan.

Apabila pelatihan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka atau dengan skala besar yaitu melibatkan peserta pelatihan di luar lingkungannya, memanfaatkan fasilitas umum dan melibatkan pergerakan massa, maka pemohon harus mengajukan permohonan koordinasi atau pemberitahuan kepada pemerintah setempat atau lembaga berwenang dengan menyertakan dokumen rencana pelatihan, jenis sumber potensi bencana, jumlah peserta, dan persyaratan lainnya sesuai dengan persyaratan dari pihak berwenang. Bilamana permohonan ditolak karena alasan dokumen persyaratan tidak lengkap, maka pemohon harus melengkapi kembali persyaratan yang diminta. Kemudian pemohon memperbaiki atau melengkapi semua persyaratan yang diminta, kemudian kembali mengajukan permohonan koordinasi.

**Tabel 1 - Tugas dan fungsi organisasi pelatihan penanggulangan bencana**

| Jabatan | Tugas dan Fungsi |
|---|---|
| Pimpinan Pelatihan | Bertanggungjawab atas pelaksanaan pelatihan antara lain mengajukan permohonan pemberitahuan dan atau koordinasi untuk melaksanakan pelatihan penanggulangan bencana kepada pihak pemerintah setempat atau lembaga berwenang, bekerjasama dengan pengawas, instruktur dan menerima masukan dari penilai serta pengamat. |
| Sekretariat | Membantu pimpinan pelatihan dalam penyiapan administrasi pengajuan permohonan-koordinasi, permintaan instruktur, pengawas, penilai maupun pengamat dan mengedarkan undangan kepada para narasumber, pengajar dan peserta pelatihan. Tugas lainnya adalah melaksanakan kegiatan administrasi seperti pencatatan perencanaan kebutuhan sumberdaya baik berupa dana, personel, sarana dan prasarana pelatihan; tempat pelatihan dan kebutuhan administrasi lainnya |
| Seksi Perencanaan dan Persiapan | Berperan dalam perencanaan dan persiapan pelatihan, memilih jenis bencana yang berpotensi, menyiapkan skenario pelatihan, mempersiapkan tempat pelatihan dan mengkoordinasi sumberdaya yang dibutuhkan. Seksi ini menerima masukan melalui pimpinan dari tim penilai dan pengamat untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan persiapan dalam pelatihan berikutnya. |
| Seksi Pelaksanaan Pelatihan | Memiliki peran dalam melaksanaan pelatihan sesuai dengan sekenario yang disiapkan, bekerjasama dengan pengawas dan instruktur pelatihan dan menerima masukan melalui pimpinan dari penilai dan pengamat pelatihan untuk memperbaiki kualitas pelatihan |
| Seksi Sosialisasi dan Dokumentasi | Bertugas untuk mensosialisasikan kegiatan mulai dari ajakan mengikuti pelatihan, memberikan informasi hasil pelatihan, mencatat, mendokumentasikan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan sebagai bahan evaluasi |
| Tim Pengawas dan Instruktur | Tim yang ditunjuk oleh pemerintah setempat atau lembaga yang berwenang, berperan dalam memberikah pengawasan dan pengarahan pelatihan |
| Tim Penilai dan Pengamat | Tim yang bertugas untuk mengawasi jalannya pelatihan, apakah sudah sesuai dengan rencana, skenario dan menilai sejauh mana pelatihan mencapai sasarannya |

Pemohon pelatihan dapat mulai melakukan persiapan dan pengorganisasian sumber daya bilamana telah mendapat rekomendasi pelaksanaan pelatihan. Selanjutnya, pemohon mulai melengkapi rencana pelatihan, pendataan peserta pelatihan, menghubungi instruktur dan pengawas dari lembaga berwenang serta mengundang pengamat dan penilai yang kompeten.

### 3.2 Siklus manajemen pelatihan penanggulangan bencana

Pelatihan penanggulangan bencana meliputi tiga tahapan dalam suatu siklus pelatihan penanggulangan bencana, yaitu: a) Perencanaan dan persiapan; b) Pelaksanaan dan c) Evaluasi, pelaporan dan perbaikan, seperti diperlihatkan pada Gambar 2.

**Gambar 2- Siklus manajemen pelatihan penanggulangan bencana**

Proses manajemen pelatihan penanggulangan bencana dimulai dari perencanaan dan persiapan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan evaluasi, pelaporan sampai tindakan perbaikan yang berkesinambungan seperti diperlihatkan pada Gambar 2. Siklus manajemen pelatihan penanggulangan bencana dapat disesuaikan dengan jenis bencana.

#### 3.2.1 Tahap perencanaan dan persiapan

Tahap perencanaan dan persiapan meliputi:

1. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pejabat berwenang dan pengawas pelatihan;
2. Menyusun rencana umum dan rencana operasional pelatihan dengan mengidentifikasi tingkat kemampuan, kapasitas atau kompetensi yang dibutuhkan;
3. Menyusun tugas, fungsi dan peran organisasi pelaksana pelatihan;
4. Melakukan penyiapan tempat pelatihan, berupa gedung atau ruangan lainnya dengan luas, sarana dan prasarana yang memadai untuk pelatihan;
5. Memberikan pengarahan bagi pelaksana pelatihan oleh instruktur atau pengawas pelatihan dengan tujuan untuk memastikan seluruh perencanaan pelatihan dapat berjalan dengan baik;
6. Memberikan pengarahan kepada tim penilai dan pengamat untuk dapat memahami rencana pelatihan, mekanisme jalannya pelatihan, dan materi yang akan dievaluasi dari peserta maupun penyelenggara pelatihan;
7. Melakukan kegiatan sosialisasi oleh Seksi Sosialisasi dan Dokumentasi sebelum melaksanakan pelatihan sebagai salah satu cara agar masyarakat yang tinggal di sekitar daerah pelatihan dapat dilibatkan sebagai pelaku pelatihan;

8. Menyiapkan daerah pelatihan oleh seksi perencanaan dan persiapan untuk pelatihan tingkat lanjut untuk memastikan kesiapan daerah pelatihan, kebutuhan peralatan, logistik, keamanan, dan aksesibilitas;
9. Menyiapkan kegiatan pra-latihan yang diperlukan untuk pelatihan pada tingkat lanjut atau uji sistem dengan melibatkan unsur penyelenggara pelatihan, pelaku pelatihan, tim evaluasi, pengamat dan pengawas pelatihan,
10. Melakukan evaluasi terhadap hasil rekomendasi tim penilai dan pengamat untuk memperbaiki kualitas pelatihan bagi perencanaan kegiatan pelatihan lanjutan.

### 3.2.2 Tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan pelatihan, pengawas atau instruktur pelatihan melakukan verifikasi kesiapan para staf Seksi Pelaksana, perwakilan peserta pelatihan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan. Seksi Sosialisasi dan Dokumentasi menyiapkan sosialisasi akhir dan persiapan dokumentasi pelatihan. Pelatihan dimaksudkan untuk menguji:

1) berbagai pengetahuan yang dibutuhkan sehingga peserta pelatihan memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik tentang potensi bencana dan risikonya;
2) peningkatan keterampilan melalui berbagai bentuk pelatihan dengan menggunakan simulasi untuk mencapai sasaran yang diharapkan;
3) sistem atau keterampilan untuk memastikan pengetahuan dan keterampilan tersebut sudah sesuai dengan sasaran yang diharapkan, dengan memerankan fungsi komando, kendali dan komunikasi antar pemangku kepentingan yang terkait, serta seluruh sumberdaya yang tersedia disinergikan, sebagaimana dalam situasi kedaruratan yang sebenarnya terjadi.

#### 3.2.2.1 Metoda pelatihan penanggulangan bencana

Dalam pelaksanaan pelatihan, mekanisme dan metode pelatihan dilakukan secara komprehensif mulai dari tingkat dasar, menengah sampai tingkat lanjut.

##### 3.2.2.1.1 Pelatihan tingkat dasar

Pelatihan tingkat dasar dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap sumber dan ancaman bencana bagi peserta pelatihan yang belum pernah mendapatkan pelatihan penanggulangan bencana. Mekanisme dan metode pelatihan berupa ceramah oleh para narasumber yang kompeten terkait pengetahuan mengenai sumber bencana dan dampaknya, diikuti oleh tanya jawab, diskusi dan rekomendasi apa yang harus disiapkan oleh pemangku kepentingan. Pelatihan dilaksanakan dalam suatu ruangan dengan luas ruangan menyesuaikan dengan jumlah peserta pelatihan yang dilibatkan atau ruangan yang tersedia dilengkapi sarana-prasarana yang diperlukan.

##### 3.2.2.1.2 Pelatihan tingkat menengah

Pelatihan pada tingkat menengah dilakukan bilamana peserta pelatihan telah memiliki pengetahuan tingkat dasar. Pelatihan pada tingkat menengah atau simulasi dirancang untuk meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan peserta pelatihan. Pelatihan pada tingkat ini berupa kegiatan berdasarkan suatu skenario pelatihan tertentu dimana pengetahuan maupun keterampilan peserta latih ditingkatkan melalui pelatihan dengan menggunakan berbagai macam peragaan termasuk cara informasi peringatan bencana diterbitkan dan diterima oleh petugas yang berwenang yang diteruskan kepada pimpinan pelatihan dan staf serta tanggapannya terhadap informasi tersebut.

Melalui pelatihan pada tahap ini, pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan ditingkatkan sampai mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam rencana atau skenario pelatihan yang diujikan. Pada tahap ini, proses pengendalian dan penilaian pelatihan lebih meningkat dibanding pelatihan pada tingkat dasar. Metoda pelatihan pada tingkat menengah meliputi geladi ruang, bermain peran dan, uji latihan.

**a) Geladi ruang**

Geladi Ruang atau *Table-Top Exercise*/ TTX adalah pelatihan dalam bentuk diskusi pada tingkatan pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat, organisasi atau pemangku kepentingan penanggulangan bencana. Topik diskusi adalah membahas kasus atau permasalahan yang muncul akibat suatu bencana dan peran setiap unsur dalam kelompok masyarakat, organisasi atau pemangku kepentingan dalam operasi penanggulangan bencana berdasarkan skenario pelatihan dengan maksud meningkatkan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab ketika bencana sedang terjadi.

**b) Bermain peran**

Pelatihan dilaksanakan dalam ruangan dengan menggunakan alat bantu peraga seperti maket, bak pasir, miniatur, peta berukuran besar atau slide paparan berdasarkan suatu skenario pelatihan yang telah disepakati. Tujuan menerapkan metode ini adalah untuk melatih para pelaku pelatihan dengan semua sumberdaya yang dimilikinya untuk memahami peranannya dalam suatu medan simulasi atau melatihkan pemahaman jalur koordinasi dan mengeksplorasi proses pengambilan keputusan berdasarkan pada skenario yang diberikan dengan mengabaikan realisme waktu.

**c) Uji latihan**

Pelatihan pada tingkat uji latihan atau *drill* melibatkan aset dan personel sesungguhnya dalam suatu rangkaian skenario pelatihan. Kegiatan uji latihan dilaksanakan di daerah latihan dengan tidak mengurangi realisme pelatihan. Selama pelaksanaan uji latihan, jalur komunikasi antar pelaku dan antara pengendali dan pelaku menggunakan alat bantu komunikasi. Sifat pelatihan dalam uji latihan dilakukan dengan satu pihak dikendalikan dalam hal ini (a) pelaku pelatihan terdiri dari satu pihak dan (b) pihak pengendali yang mengarahkan tindakan pelaku agar bertindak sesuai skenario pelatihan. Sementara itu "situasi darurat kebencanaan" disiapkan oleh penyelenggara pelatihan ataupun diperankan oleh penimbul situasi (bulsi/*role player*) yang dikendalikan oleh tim pengendali.

#### 3.2.2.1.3 Pelatihan tingkat lanjut

Pelatihan tingkat lanjut dikenal sebagai latihan atau uji sistem, dimana mekanisme dan metode pelatihan mencapai tahapan yang paling rumit. Pelatihan ini diawali dengan kegiatan pra-pelatihan dengan melibatkan unsur penyelenggara pelatihan, pelaku pelatihan, tim evaluasi, pengamat dan pengawas pelatihan. Pelatihan pada tingkat ini, dimaksudkan untuk menguji kesiapan dan keterampilan peserta pelatihan dalam menerapkan standar prosedur penanggulangan bencana, menguji sistem informasi dan garis perintah serta menguji sistem peringatan bencana beserta alur informasi yang diperlukan. Metode pelatihan penanggulangan bencana pada tingkat lanjut terdiri atas dua tingkatan meliputi geladi posko dan geladi lapangan.

**a) Geladi posko**

Pelatihan geladi posko merupakan pelatihan berdasarkan suatu skenario pelatihan yang mensimulasikan kegiatan operasi tanggap darurat yang sebenarnya atau seperti sedang menggambarkan kejadian se-realistis mungkin. Pelatihan ini melibatkan satu atau multi-pihak, lembaga/instansi atau unsur masyarakat, swasta, LSM atau pemangku kepentingan atau peserta pelatihan. Peserta pelatihan diberikan berbagai permasalahan yang rumit tetapi realistis, serangkaian keadaan dan kejadian yang sambung menyambung, mengandung persoalan yang harus dipecahkan dan pengambilan keputusan, rencana, perintah, dan tindakan yang membutuhkan tanggapan/aksi yang cepat dan efektif dari para pelakunya dan pengendalian waktu yang baik tanpa pengerahan peralatan. Situasi dikembangkan melalui para pengendali yang meneruskan semua persoalan dalam hubungan garis perintah ke atas, bawah, dan ke samping guna mensimulasikan kejadian sesungguhnya. Pelatihan ini merupakan upaya dalam memvalidasi atau memperbaiki suatu rencana atau kebijakan dan prosedur yang telah ada, menguji kapasitas dan berbagai fungsi, peran serta tanggungjawab suatu unit atau bidang dalam organisasi yang saling berkaitan untuk dapat menggerakkan seluruh sumber daya yang sebenarnya. Selain itu pelatihan ini juga berperan dalam menguji kapasitas, meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampila personil di kalangan peserta pelatihan.

**b) Geladi lapangan**

Pelatihan geladi lapangan merupakan pelatihan yang paling kompleks karena melibatkan multi-institusi, seluruh unsur pelaku penanggulangan bencana baik yang berasal dari kalangan pemerintah, masyarakat, komunitas, LSM atau pihak swasta dengan mempraktekkan peran dan fungsi yang telah dipelajari sebelumnya. Sasaran dari latihan ini adalah untuk menyempurnakan dan menguji pengetahuan dan keterampilan operasional dan fungsional perorangan maupun organisasi penanggulangan bencana dalam situasi yang menggambarkan kondisi nyata kedaruratan dampak bencana di daerah pelatihan sesungguhnya. Geladi lapangan bertujuan untuk mengevaluasi berbagai fungsi rencana kontingensi, rencana operasi, maupun peran dan tanggungjawab di kalangan unsur masyarakat, LSM atau stakeholder lainnya yang terlibat langsung dalam organisasi penanggulangan bencana.

### 3.2.3 Tahap evaluasi, pelaporan dan perbaikan

Pada tahap ini, dilakukan evaluasi terhadap hasil pelatihan yang dilakukan paling lambat satu minggu setelah pelatihan dilaksanakan. Evaluasi dipimpin oleh pimpinan pelatihan dan seluruh seksi, termasuk tim penilai dan pengamat dan dihadiri oleh instruktur atau pengawas. Akhir dari kegiatan pelatihan adalah melakukan penutupan pelatihan secara resmi oleh pimpinan pelatihan atau pejabat berwenang yang hadir atau yang ditunjuk dan demobilisasi peserta pelatihan dari tempat pelatihan ke tempat kedudukan masing-masing dipimpin pimpinan pelatihan;

Kegiatan evaluasi antara lain:

a) Melakukan pertemuan antara pimpinan pelatihan dan seksi-seksi pelatihan, tim instruktur dan pengawas, tim penilai dan pengamat guna melakukan kaji ulang yang bertujuan untuk melakukan penilaian proses pelatihan yang telah dilaksanakan, mengkompilasi dan menganalisis isian formulir penilaian pelatihan guna mengulas hal-hal apa yang sudah sesuai dengan skenario pelatihan ataupun yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan pelatihan berikutnya;
b) Mengkaji perencanaan, kebijakan dan prosedur yang sudah ada;
c) Mengidenfikasi kesenjangan yang masih ada sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan;

d) Menentukan efektivitas pelaksanaan pelatihan berdasarkan hasil penilaian dari berbagai indikator yang telah ditetapkan sebelumnya;
e) Memberikan penilaian secara komprehensif pencapaian tujuan dan sasaran pelatihan. Kelengkapan dan ketajaman penilaian sebagai bahan evaluasi diukur dari hasil kaji ulang dan hasil tim penilai dan pengamat dibandingkan dengan tujuan dan sasaran pelatihan yang telah direncanakan;
f) Menindaklanjuti kegiatan kaji ulang yang dilaksanakan dalam kegiatan penilaian, tindakan perbaikan dan penyusunan laporan;
g) Memberikan penilaian kegiatan pelatihan terhadap:
    a. kemampuan peserta pelatihan;
    b. kemampuan pelaksana pelatihan,
    c. kemampuan penguasaan materi oleh narasumber, pengajar atau pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pelatihan penanggulangan bencana; dan

h) Mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul selama pelatihan berlangsung

Indikator penilaian keberhasilan sekurang-kurangnya meliputi: keseriusan peserta pelatihan, pemahaman tentang tujuan pelatihan, kecakapan pelaksana pelatihan, dan penguasaan materi oleh narasumber atau pihak yang terlibat dalam pelatihan. Indikator lain dapat ditambahkan sesuai kebutuhan. Dari hasil penilaian ini diperoleh status keberhasilan pelatihan, identifikasi kesenjangan berdasarkan kendala yang ditemukan selama pelatihan dan pembelajaran yang diperoleh

Hasil penilaian ini kemudian disusun dalam sebuah laporan penilaian pelatihan dan menjadi bahan untuk membantu dalam mengambil keputusan atau langkah yang tepat bagi perbaikan yang dibutuhkan dalam perencanaan pelatihan berikutnya. Penilaian keberhasilan pelatihan berupa: (a) berhasil, (b) perlu peningkatan kapasitas, (c) perlu perbaikan prosedur dan perencanaan, atau (d) gagal.

Untuk menindaklanjuti hasil penilaian pelatihan dilakukan pendampingan oleh instruktur atau pengawas pelatihan dengan maksud:
a) menjamin perencanaan dan pelaksanaan yang lebih baik;
b) menjamin pelatihan terintegrasi dalam sistem kesiapsiagaan;
c) memperkuat kapasitas pemerintah setempat atau lembaga berwenang dalam penanggulangan bencana.

## Bibliografi

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

[2] Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

[3] Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

[4] Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Penanggulangan Bencana

[5] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

## Informasi pendukung terkait perumus standar

**[1] Komite Teknis perumus SNI**
Komite Teknis 13-08 Penanggulangan Bencana

**[2] Susunan keanggotaan Komite Teknis perumus SNI**

| | |
|---|---|
| Ketua | : Lilik Kurniawan |
| Wakil Ketua | : Isman Justanto |
| Sekretaris | : Indah Mugi Lestari |
| Anggota | : Arifin Muhammad Hadi |
| | Aunur Rofiq |
| | Bambang Marwanta |
| | Sugeng Triutomo |
| | Mohd. Robi Amri |
| | Haryadi Permana |
| | Harkunti Pertiwi Rahayu |
| | J. Victor Rembeth |
| | Soesmarjanto Soemoko |
| | Prihadi Waluyo |
| | Eko Teguh Paripurno |
| | Gunawan Sakri |

**CATATAN:**
Susunan keanggotaan Komite Teknis 13-08 di atas adalah susunan pada saat standar ini ditetapkan. Anggota Komite Teknis yang juga turut menyusun sebelum perubahan keanggotaan pada bulan Juni 2017, adalah:

1. Esti Premati
2. Elin Linawaty
3. Prakoso
4. Alie Humaedi

**[3] Konseptor rancangan SNI**
Haryadi Permana– Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

**[4] Sekretariat pengelola Komite Teknis perumus SNI**
Pusat Perumusan Standar
Badan Standardisasi Nasional
Gedung BPPT 1 Lantai 14
Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340
Telepon: (021) 3927422 Faksimile : (021) 3927528